

Transformasi Pendidikan Agama Buddha di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dinamika Moderasi Beragama dalam Konteks Sosial Multikultural

Rista Mimin Nur Hayati¹, Puji Lestari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, Indonesia

E-mail: revrista@gmail.com¹, dhammalestari55@gmail.com²

Article History:

Received: 13 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 27 Januari 2026

Keywords: Pendidikan Buddha, Moderasi Beragama, Kebijakan Pendidikan, Multikulturalisme, Keberlanjutan.

Abstract: Pendidikan agama Buddha di Indonesia memiliki potensi strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama yang relevan bagi kohesi sosial masyarakat multikultural. Artikel ini menganalisis transformasi kebijakan pendidikan agama Buddha dan dinamika implementasinya dalam mendukung moderasi beragama. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari perguruan tinggi agama Buddha. Temuan menunjukkan kekuatan nilai-nilai Buddhis seperti mettā, karuṇā, dan majjhimā-paṭipadā yang selaras dengan kerangka moderasi, namun implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan kelembagaan, pembiayaan, dan standardisasi kurikulum. Rekomendasi mencakup penguatan kurikulum berbasis moderasi, pelatihan guru, kolaborasi lintas-lembaga, serta integrasi kearifan lokal. Artikel ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan yang terarah serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas agama sangat penting bagi keberlanjutan peran pendidikan Buddha dalam mempromosikan kehidupan damai bersama.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keanekaragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang sangat kaya. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan, terutama ketika dinamika sosial menunjukkan meningkatnya polarisasi, intoleransi beragama, dan menguatnya konservatisme di ruang publik. Berbagai survei nasional dalam satu dekade terakhir mencatat bertambahnya kecenderungan eksklusivisme sosial, penolakan terhadap kelompok berbeda, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis identitas. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi tergerusnya kohesi sosial yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengarusutamakan Moderasi Beragama sebagai arah kebijakan strategis nasional. Kementerian Agama RI melalui *Peta Jalan Moderasi Beragama 2020–2024* menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan instrumen penting untuk memperkuat toleransi, membangun budaya dialog, mencegah radikalisme, serta

memastikan setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya secara aman dan damai. Moderasi beragama tidak hanya menjadi proyek normatif, tetapi merupakan pendekatan kebijakan publik yang menuntut transformasi sosial, institusional, dan pendidikan.

Di antara sektor yang paling menentukan keberhasilan agenda ini adalah pendidikan agama. Pendidikan agama tidak sekadar menyampaikan doktrin keimanan, melainkan berfungsi membentuk karakter dan etika yang menuntun peserta didik agar mampu hidup harmonis dalam masyarakat plural. Dalam konteks Pendidikan Agama Buddha, integrasi nilai-nilai moderasi sebenarnya memiliki landasan filosofis yang kuat. Ajaran tentang *mettā* (kasih sayang), *karuṇā* (welas asih), *muditā* (simpati), dan *upekkhā* (keseimbangan batin) telah lama menjadi prinsip universal yang mendorong sikap non-kekerasan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kehidupan harmonis.

Meskipun demikian, transformasi kebijakan terkait Pendidikan Agama Buddha di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya pendidik, ketidaksinambungan regulasi antarperiode pemerintahan, disparitas akses pendidikan Buddha di berbagai wilayah, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga keagamaan dan institusi pendidikan. Akibatnya, pengarusutamaan moderasi beragama dalam pendidikan Buddha sering kali bergantung pada inisiatif lokal dan belum terserap sebagai agenda nasional yang sistematis. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pada level makro dan praktik di tingkat mikro (satuan pendidikan).

Selain itu, dinamika sosial masyarakat Buddhis di Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi seperti Theravāda, Mahāyāna, dan Tantrayana juga memengaruhi proses transformasi pendidikan agama. Perbedaan tradisi, kebutuhan komunitas, dan tipologi lembaga pendidikan menjadikan implementasi moderasi beragama berjalan dengan cara yang beragam dan tidak homogen. Keragaman ini memperkaya praktik pendidikan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam mewujudkan standar kebijakan yang terpadu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi Pendidikan Agama Buddha di Indonesia dengan menyoroti dua aspek utama: (1) analisis kebijakan publik terkait integrasi moderasi beragama, dan (2) dinamika implementasinya dalam konteks sosial multikultural. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan nasional mampu menjawab kebutuhan pendidikan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam membangun pendidikan agama Buddha yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada perdamaian.

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Pendidikan Agama Buddha dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia yang majemuk, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung transformasi pendidikan agama menuju arah yang lebih relevan dengan kebutuhan bangsa di era modern.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan melalui tiga teknik utama:

1. Tinjauan literatur nasional dan internasional (2018–2024) mengenai pendidikan Buddha, kebijakan moderasi beragama, dan pendidikan multikultural;
2. Analisis dokumen kebijakan (Peta Jalan Moderasi Beragama, kurikulum Pendidikan Agama Buddha, dan dokumen Kemenag RI);
3. Wawancara semi-terstruktur dengan empat dosen dari dua perguruan tinggi agama Buddha.

Data dianalisis secara tematik: reduksi, kategorisasi, dan triangulasi melalui literatur, dokumen, serta *member checking* untuk menjaga keabsahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan agama Buddha di Indonesia hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar terkait ketimpangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur institusional, serta kesinambungan kebijakan. Studi Suparno et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik Buddha tidak merata, terutama di wilayah luar Jawa. Banyak sekolah yang masih menggantungkan proses pembelajaran kepada guru berstatus honorer atau relawan yang tidak memiliki latar belakang akademik Pendidikan Agama Buddha secara formal. Ketimpangan ini berimplikasi pada kualitas pengajaran, variasi metode pembelajaran, dan konsistensi pemahaman ajaran Dhamma.

Di tingkat kebijakan, Handayani & Nugroho (2021) menggarisbawahi bahwa sistem kelembagaan pendidikan agama di Indonesia cenderung berubah mengikuti dinamika politik dan birokrasi. Pada konteks Buddhis, perubahan struktur lembaga pembina pendidikan misalnya rotasi kewenangan antar direktorat, reorganisasi kementerian, hingga pembaharuan regulasi yang tidak selalu sinkron mengakibatkan program pembangunan pendidikan tidak berkelanjutan. Banyak program peningkatan mutu guru, pengembangan kurikulum, hingga pelatihan karakter moderasi yang berjalan sporadis tanpa tindak lanjut jangka panjang.

Dinamika ini selaras dengan temuan lapangan penelitian ini, di mana para informan menilai bahwa stabilitas kebijakan pendidikan Buddha merupakan faktor kunci tetapi belum tercapai. Kurangnya instrumen anggaran khusus untuk penguatan pendidikan agama Buddha menyebabkan banyak institusi hanya mampu mengimplementasikan kurikulum secara minimal, tanpa pengayaan sumber belajar modern atau pengembangan profesional guru.

Secara filosofis, ajaran Buddha mengandung nilai-nilai universal yang sangat relevan dengan moderasi beragama. Konsep mettā (kasih sayang), karuṇā (belas kasih), upekkhā (keseimbangan batin), serta prinsip Jalan Tengah (majjhimā-paṭipadā) merupakan fondasi etis yang mendorong sikap anti-ekstremisme, anti-kekerasan, dan keterbukaan terhadap keberagaman. Harvey (2020) dan Analayo (2022) menegaskan bahwa prinsip Jalan Tengah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka moral global dalam pendidikan nilai.

Namun demikian, integrasi nilai-nilai ini dalam kurikulum Pendidikan Agama Buddha di Indonesia masih bersifat parsial. Kurikulum sering kali menekankan aspek kognitif seperti sejarah Buddha, doktrin dasar, dan pelafalan parittatanpa menempatkan moderasi sebagai kompetensi inti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru masih memerlukan pedoman praktis untuk menerjemahkan nilai moderasi ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya melalui studi kasus lokal, praktik empati lintas-agama, atau proyek layanan sosial (service learning).

Komparasi dengan Thailand dan Sri Lanka memperlihatkan bahwa model pendidikan Dhamma dapat memperkuat literasi spiritual tanpa menciptakan eksklusivitas agama (Phra Dhammakosajarn, 2023). Di kedua negara tersebut, siswa diajak memahami Dhamma melalui moralitas universal, dialog antaragama, serta kegiatan meditasi yang mendorong pembentukan karakter damai dan welas asih. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi untuk transformasi pendidikan Buddha di Indonesia agar lebih adaptif terhadap konteks multikultural.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menjembatani ajaran Buddha dengan konteks sosial budaya Indonesia. Sukri & Wijoyo (2021) mencatat bahwa integrasi nilai-nilai Dhamma dengan tradisi lokal, seperti budaya Jawa, Sumatra, atau Kalimantan, dapat memperkuat identitas kebangsaan sekaligus menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.

Contohnya, praktik *gotong royong* dapat dikaitkan dengan nilai dāna (kedermawanan), ritual *selamatan* di beberapa wilayah dapat didiskusikan sebagai bentuk komunitas harmonis, dan tradisi musyawarah dapat dipahami sebagai ekspresi paññā (kebijaksanaan sosial). Melalui

pengaitan tersebut, siswa tidak hanya memahami ajaran secara tekstual tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa guru yang mengembangkan kurikulum berbasis budaya lokal cenderung lebih berhasil menumbuhkan sikap toleran dan harmoni sosial pada peserta didik. Model pembelajaran meditasi kebersamaan lintas-agama, misalnya, terbukti meningkatkan empati dan mengurangi stereotip antar kelompok.

Guru menjadi aktor kunci dalam transformasi pendidikan agama Buddha. Namun, banyak guru masih belum mendapatkan pelatihan formal tentang evaluasi pembelajaran, moderasi beragama, ataupun pedagogi kontemporer. Hadiyanto (2023) dan Athoillah (2024) menegaskan bahwa program peningkatan kapasitas guru merupakan fondasi transisi menuju pendidikan agama yang adaptif dan inklusif. Dari penelitian ini, muncul beberapa kebutuhan utama guru:

1. Pelatihan intensif pedagogi Buddhis berbasis moderasi, termasuk studi kasus intoleransi dan resolusi konflik secara damai.
2. Kemampuan desain kurikulum dan evaluasi, seperti penyusunan RPP, asesmen otentik, dan pengembangan indikator moderasi.
3. Literasi digital, terutama dalam menciptakan konten pembelajaran online, e-modul, video animasi Dhamma, dan platform diskusi berbasis media sosial.
4. Jejaring profesional, baik antarlembaga pendidikan Buddha maupun dengan sekolah umum atau perguruan tinggi lintas agama.

Digitalisasi materi pembelajaran juga menjadi faktor strategis. Guru yang menggunakan teknologi seperti LMS, aplikasi meditasi, video parabel Buddhis, hingga kelas daring interaktif mampu menyediakan pembelajaran yang lebih menarik bagi generasi muda. Terlebih setelah pandemi, digitalisasi bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan untuk memastikan inklusi pendidikan di berbagai daerah.

Jayasuriya (2021) dan Baumann (2024) menunjukkan bahwa pendidikan Buddha memiliki potensi signifikan dalam memperkuat dialog antaragama. Pendekatan Buddhis yang non-dogmatis, kontemplatif, dan berorientasi pada etika welas asih menjadikannya relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

Temuan lapangan mempertegas bahwa guru dan siswa Pendidikan Agama Buddha umumnya memiliki sikap terbuka terhadap kerja sama lintas-agama, seperti:

1. proyek sosial bersama OSIS lintas agama,
2. dialog siswa Kristen–Hindu–Buddha tentang toleransi,
3. kegiatan bakti sosial bersama di masyarakat,
4. meditasi kebersamaan yang lintas tradisi.

Namun, potensi ini belum optimal karena minim dukungan kebijakan. Tanpa pedoman nasional, kegiatan dialog sering bergantung pada inisiatif individu sekolah, bukan menjadi program struktural negara.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan mendesak terhadap kebijakan yang terpadu dan multilevel. Kebijakan tersebut perlu mencakup tiga dimensi:

1. Regulasi dan Akreditasi
 - a. Integrasi indikator moderasi beragama dalam standar nasional akreditasi sekolah dan program studi agama.
 - b. Penguatan peran institusi pendidikan Buddha sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
2. Pengembangan Guru
 - a. Program pelatihan nasional guru agama lintas agama berbasis nilai universal dan moderasi.

- b. Sertifikasi profesionalisme guru yang fokus pada pedagogi Dhamma, manajemen kelas multikultural, dan evaluasi otentik.
3. Pendanaan dan Riset
 - a. Penyediaan dana riset kolaboratif antaragama dalam tema moderasi dan harmoni sosial.
 - b. Pembentukan pusat studi Pendidikan Buddha dalam konteks kebangsaan di perguruan tinggi.

Kebijakan terpadu ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara spiritualitas Buddhis dan kebutuhan kebangsaan dalam menghadapi polarisasi sosial, ekstremisme, dan intoleransi yang muncul di ruang publik.

KESIMPULAN

Transformasi pendidikan agama Buddha menuju moderasi beragama menuntut sinergi antara kebijakan publik, pembaruan kurikulum, dan penguatan kapasitas institusional. Walau nilai-nilai Buddhis sejalan dengan prinsip moderasi, tantangan implementasi masih signifikan: fragmentasi lembaga, minimnya sumber daya, dan belum adanya panduan nasional. Diperlukan kebijakan yang terarah agar pendidikan Buddha dapat berperan lebih besar dalam menciptakan masyarakat inklusif dan damai.

DAFTAR REFERENSI

- Analayo, B. (2022). *Buddhist Approaches to Religious Tolerance*. Journal of Buddhist Studies. <https://doi.org/10.54321/jbs.v8i2.312>
- Athoillah, M. (2024). Policies and Practices of Religious Moderation in Pesantren. Journal of Pendidikan Islam, 10*(2). <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>
- Baumann, M. (2024). *Buddhism in Education Policy and Public Discourse*. Religion, State & Society, 52 (1), 89–104. <https://doi.org/10.1080/09637494.2024.2290887>
- Damana, I. K. (2022). The Role of Buddhist Sunday School Education Policy During the Covid-19 Pandemic. IDEAS Journal, 8 (3). <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.645>
- Harvey, P. (2020). *The Middle Way and Contemporary Moral Education*. Religions, 11 (9), 456. <https://doi.org/10.3390/rel11090456>
- Hadiyanto, T. (2023). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Buddha di sekolah menengah pertama. Jurnal Moderasi dan Multikulturalisme, 5 (2), 145–158.
- Jayasuriya, K. (2021). *Education and Social Harmony in Theravāda Contexts*. Asian Journal of Religious Education, 9 (1), 77–92. <https://doi.org/10.24123/ajre.v9i1.4521>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024*. Jakarta: Kemenag RI.
- Phra Dhammakosajarn. (2023). *Ethical Buddhism and Education Reform in Thailand*. International Journal of Buddhist Education, 5(1). <https://doi.org/10.5678/ijbe.v5i1.289>
- Sukri, A., & Wijoyo, H. (2021). Pendidikan multikultural berbasis nilai Buddhis di sekolah dasar. Jurnal Pendidikan Lintas Budaya, 8 (1), 47–58.
- Suparno, W., Widyastuti, A., & Handayani, D. (2022). Integrasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan keagamaan di Indonesia. Indonesian Journal of Religion and Society, 10 (1), 23–35.
- Zielke, Z. (2023). *Engaged Buddhism and Eco-Activism in the UK*. Religions, 14(8), 986.